

PERTEMUAN 5:

KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada pertemuan ini akan dibahas tentang:

1. E-Government
2. Aplikasi komputer yang diterapkan pada Badan Pemerintahan
3. Isu sosial dan masalah

B. URAIAN MATERI

1. E-Government

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital (digital government), online government atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

- a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)

Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,

Contoh G2C: Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b. Government-to-Business (G2B)

Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.

Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

c. Government-to-Government (G2G)

Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi. Mengacu pada definisi yang diajukan oleh World Bank, e-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan (misal dengan Wide Area Networks, Internet, komputer bergerak, dst), yang dengan semua itu mempermudah dan meningkatkan kemampuan transformasi hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan bagian-bagian lain dari pemerintahan. Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk kebutuhan yang berbeda karena layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya, peningkatan interaksi antara bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen pemerintahan. Hasil yang akan dapat dilihat dari penggunaan Teknologi Informasi (TI) adalah penurunan korupsi, meningkatkan transparansi, kesenangan yang lebih baik, pertumbuhan pajak dan penghasilan, dan/atau reduksi biaya-biaya.

2. Aplikasi komputer yang diterapkan pada Badan Pemerintahan

Berikut ini adalah beberapa aplikasi yang biasa diterapkan pada pemerintahan guna mendukung sistem e-Government:

a. Aplikasi Kepegawaian

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) mulai memanfaatkan computer sejak beberapa tahun yang lalu. Aplikasi kepegawaian ini meliputi bidang permasalahan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun dll.

b. Aplikasi di Pemerintahan Daerah

Sejak tahun 1973 pemerintah daerah sudah mempergunakan komputer untuk administrasinya. Aplikasi tersebut meliputi bidang kependudukan kepegawaian tingkat daerah, pajak-pajak daerah, perumahan dan lalu lintas.

c. e-Budgeting.

Merupakan sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan Negara atau daerah secara komputerisasi. Aplikasi ini membuat pemerintah tidak bisa menggunakan anggaran sesuka hati karena semua akan tercatat lengkap serta dapat diakses pelaporannya oleh masyarakat luas. Aplikasi ini juga sering dianggap sebagai salah satu senjata melawan korupsi anggaran Negara/daerah di pemerintahan. Di Surabaya, aplikasi ini digunakan dan berhasil membantu memajukan daerah tersebut.

d. e-Catalog Merupakan salah satu contoh sistem G2B (Government to Business),

dimana para pelaku bisnis dapat menyediakan informasi cepat dan benar untuk mengenalkan bidang usahanya atau memasarkan produknya (barang dan/ atau jasa) kepada pemerintah. Informasi ini juga dapat digunakan oleh masyarakat umum. Aplikasi ini disebut sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan lelang barang dan jasa yang sering merugikan keuangan Negara.

3. Isu sosial dan masalah

Berikut ini adalah beberapa isu sosial dan masalah yang muncul dari penerapan sistem eGovernment.

- a. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system

TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

- b. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.
- c. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses public untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bisa opini publik.
- d. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintahan.
- e. Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government.
- f. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah factor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.
- g. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet Meskipun telah lama diatur dalam undang-undang untuk segera diterapkan di seluruh sendi pemerintahan, namun tidak semua daerah menerapkan sistem e-Government. Beberapa alasan yang klasik antara lain, tidak cukup anggaran untuk membeli atau mengembangkan sistem e-Government, tidak tersedianya Sumber daya Manusia yang cukup untuk mengelola e-Government, dan lain-lain.

SOAL LATIHAN DAN TUGAS

1. Jelaskan pengertian dari e-government!
2. Sebutkan manfaat e-government bagi masyarakat!
3. Bagaimana perkembangan e-government di Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

Ade Gunawan, Budi Yuwono, 2007. Pengembangan E-Government dalam Menuju Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Studi Kasus Biro Perencanaan dan Organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Jakarta.